

## LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL PENELITIAN

Tahun Penelitian : 2015

Judul Artikel Penelitian: Evaluasi Keefektifan Penyelenggaraan Program Beasiswa UT Bagi Guru di Daerah 3T Tahun 2015 dengan Pendekatan *The Hierarchy of Policy Process*

Penulis Artikel/NIP : 1. Dr. Agus Joko Purwanto  
2. Ace Sriati Rachman, MSi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Artikel penelitian yang tersebut di atas telah memenuhi kaidah penulisan artikel. Karena itu, artikel tersebut dapat diunggah ke simpen.

Menyetujui

Tangerang Selatan, 10 Des 2015  
Penelaah,

Dr. Darmanto

# **Evaluasi Keefektifan Penyelenggaraan Program Beasiswa UT Bagi Guru di Daerah 3T Tahun 2015 dengan Pendekatan The Hierarchy of Policy Process**

Agus Joko Purwanto (ajoko@ut.ac.id)  
Ace Sriati Rachman (ace@ut.ac.id)

## **Abstract**

One of the Government's efforts to improve the competence and qualifications of teachers of secondary school is to provide assistance to teachers who live in undeveloped areas through study on scholarship for teachers at undeveloped areas. The research problem is how the effectiveness of policy implementation of Universitas Terbuka (UT) scholarship program for teachers at undeveloped areas. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of policy implementation UT scholarship program for teachers at undeveloped areas. Guided by the Decree of the State Minister of Rural Development No. 001 / KEP / M-PDT / I / 2005, and orders the Education Minister, UT issued a policy to provide services to students who live in undeveloped areas. UT policy set forth in the Code of UT scholarship program for teachers in the undeveloped areas in 2013. The analysis tool is the Hierarchy of Policy Process of Daniel W. Bromley (1989). According to Bromley policy process structured in three levels, namely (1) the policy level (2) organizational level and (3) operational level. This study focuses on the implementation of the program. The evaluation was done at the organizational level and operational level by evaluating the pattern of interaction. This study is a qualitative study using a qualitative approach to program evaluation. Source of research data is UT regional centers, and student learning group at Bengkulu, Manado, and Surakarta regional center. The research was conducted April to November 2015. The findings of this study are that guidelines UT scholarship program for teachers at undeveloped areas in 2013 have been effective to manage the scholarship program for teachers at undeveloped areas, but need to be improved, especially on the recruitment, learning, and student learning group roles and regional centers. Observed on informants behavior found that there were differences participant motivation (perhaps physical exhaustion) among the students who joined the tutorial. Enthusiasm and familiarity in the study group of students at Wonogiri higher than other regions. The number of students who did not continue the program at Manado quite high than other regions. The students all student learning group who studied had difficulty in transportation and communication networks.

**Keywords:** disadvantaged areas, hierarchy of policy process, patterns of interaction, the group learned.

## 1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan wajib belajar untuk pendidikan dasar merupakan upaya yang terus menerus dilakukan baik dengan meningkatkan kemampuan akses terhadap peserta didik maupun ketersediaan guru yang berkualitas. Upaya peningkatan kualitas dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui pendidikan formal berjenjang, pelatihan, dan kursus. Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru lulusan sekolah menengah pada jenjang D/IV atau S1. Dalam buku Panduan UT<sup>1</sup> disebutkan bahwa dalam hingga akhir tahun 2012 masih terdapat sekitar 750.000 guru yang belum mencapai kualifikasi minimal belum mencapai kualifikasi minimal D-IV/S1. Sebagian besar dari guru-guru tersebut tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi.

Dalam jumpa pers di ruang sidang Kemdikbud pada hari Senin, 22 April 2013 Mendikbud meminta UT untuk memberikan bantuan kepada guru-guru yang berdomisili di daerah 3T tersebut melalui bantuan studi bersumber dari 20% Dana BOPTN tahun 2013 yang dialokasikan bagi UT. Bantuan studi tersebut berlaku untuk satu angkatan guru pada program sarjana. Beasiswa dari UT dilakukan mulai tahun 2013. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pembebasan biaya studi bagi para guru SD Program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UT di daerah 3T. Program beasiswa ini diperuntukkan bagi guru baik PNS maupun yang non PNS.

Sedangkan kriteria daerah 3T, UT mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 001/ KEP/M-PDT/II/2005 dan Keputusan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kab yang relevan.

Mekanisme penyelenggaraan program ini meliputi kegiatan-kegiatan perekrutan dan seleksi, registrasi, bahan ajar, pembelajaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Sedangkan pengelolaan program ini secara koordinatif dilakukan oleh semua Pembantu Rektor, Dekan FKIP, dan kepala UPBJJ.

Berdasarkan laporan dari 4 UPBJJ yaitu UPBJJ Bandung, Palembang, Padang, Jember dan Makassar diperoleh beberapa masalah yang timbul dari pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program beasiswa 3T. Beberapa masalah tersebut antara lain.

- a. Pertama, jarak yang jauh menyebabkan UT sulit menjangkau seluruh peserta dan sebaliknya peserta juga sulit menjangkau layanan pendidikan yang disediakan UT;
- b. Kedua, infrastruktur komunikasi dan transportasi yang sulit menyebabkan komunikasi antara UT dengan mahasiswa menjadi terhenti atau terganggu; dan,
- c. Lemahnya infrastruktur komunikasi dan keterampilan mahasiswa dalam mengakses informasi dan tutorial online menyebabkan tutorial online dan beberapa informasi tidak sampai kepada mahasiswa.

Dengan memperhatikan permasalahan dari lima UPBJJ tersebut masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektifan implementasi kebijakan program beasiswa UT bagi guru di daerah 3T. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keefektifan implementasi kebijakan program beasiswa UT bagi guru di daerah 3T

## 2. Kajian Pustaka

Membangun daerah tertinggal adalah merupakan upaya Pemerintah yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi daerah yang lebih maju. Permasalahan yang dialami oleh daerah tertinggal cukup kompleks tidak hanya mencakup permasalahan ekonomi tetapi juga social, budaya, dan keamanan. Daerah tertinggal berbeda daerah miskin secara ekonomi saja. Mengatasi masalah daerah tertinggal oleh karenanya memerlukan upaya yang keras dan komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah harus memiliki keberpihakan dalam melakukan program di daerah tertinggal.

Menurut Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 daerah tertinggal adalah Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Kriteria yang digunakan adalah daerah yang relatif kurang berkembang. Dalam Kepmen yang sama, ketertinggalan dalam sumberdaya manusia didefinisikan sebagai daerah dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

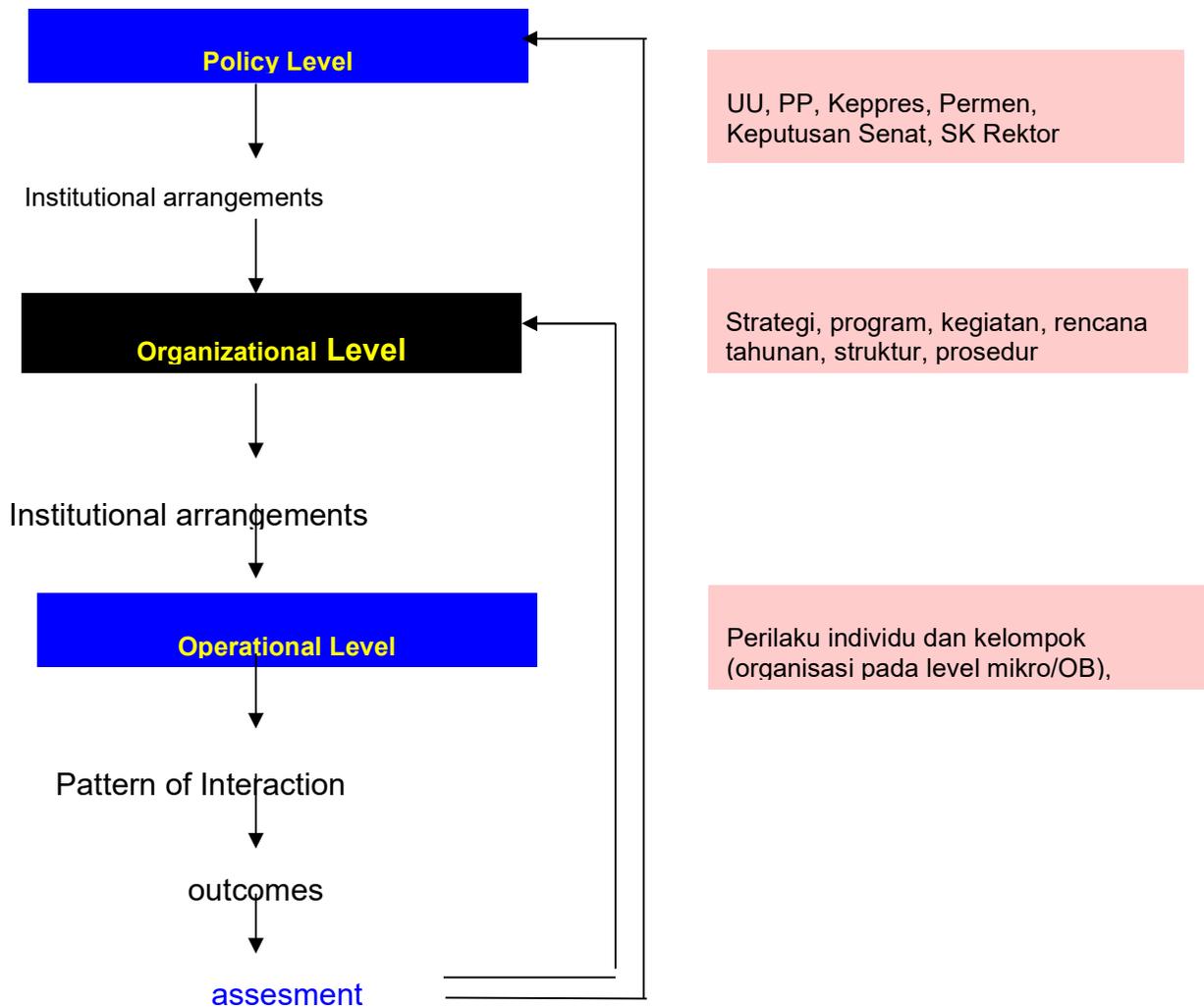
Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005, UT mengeluarkan kebijakan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa yang tinggal di daerah tertinggal. Menurut Pedoman program beasiswa UT bagi guru di daerah 3T pada tahun 2013 UT memberikan beasiswa guru SD daerah 3T sebanyak 4.130 orang yang tersebar di 199 kabupaten dan kota.

UT belum pernah melakukan evaluasi secara komprehensif pelaksanaan Program tersebut sehingga evaluasi atas program ini relevan untuk dilakukan. Kerangka pikir evaluasi mengikuti kerangka pikir yang disampaikan oleh Daniel W Bromley (1989) yang diberi nama *The Hierarchy of Policy Process*. Menurut Bromley dalam Natalia Stupak, proses kebijakan tersusun dalam tiga tingkatan yaitu :

(1) *policy level where "the general statements about the sort of the world we want to live in are debated and ultimately formulated"* (Bromley 1989: 32), (2) *organizational level understood as "implementation of those aspirations...accomplished by the development of organizations and of the rules and laws that define how those organizations will operate, but also what they will do in a programmatic sense"* (Ibid), and (3) *operational level*

where the actions of the “operating units in society...result in certain observed outcomes” (Ibid).<sup>2</sup>

Menurut Bromley seperti dikutip oleh Stupak terdapat perbedaan yang jelas antara formulasi dan implementasi kebijakan yaitu berada pada wilayah antara tingkatan policy dan organisasi. Penelitian ini berfokus pada implementasinya, jadi berfokus pada organisasinya. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, *The Hierarchy of Policy Process* yang dikembangkan oleh Bromley tersebut adalah sebagai berikut.



Bagan The Hierarchy of Policy Process

<sup>2</sup> Nataliya Stupak, *Towards Improvement Of Performance Of Environmental Policies: Addressing Policy Implementation*, hal. 2, [http://www.esee2011.org/registration/fullpapers/esee2011\\_6e5025\\_1\\_1305697321\\_4924\\_2163.pdf](http://www.esee2011.org/registration/fullpapers/esee2011_6e5025_1_1305697321_4924_2163.pdf)

Berdasarkan Bagan (Bromley, 1989) di atas, evaluasi akan dilakukan pada tingkat organisasi dan tingkatan operasionalnya dengan mengevaluasi *pattern of interaction*nya. Keefektifan organisasi pelaksanaan program akan dinilai dari keefektifan tingkat operasionalnya.

### **3. Metodologi**

Penelitian ini adalah penelitian dengan paradigma kualitatif dengan menggunakan pendekatan evaluasi program kualitatif. Tujuan utama evaluasi program dengan pendekatan kualitatif adalah mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu program di semua aspeknya (Royse, David et al, 2006). Pendekatan ini dipilih karena mampu digunakan secara efektif untuk mengevaluasi saat program sedang berlangsung. Pengumpulan data pada saat program sedang berlangsung memiliki keuntungan yaitu peneliti dapat langsung mengkonfirmasi kepada informan tentang gejala yang memerlukan penulurusan lebih lanjut. Disamping itu dengan pendekatan kualitatif, peneliti (evaluator) memiliki fleksibilitas dalam proses pengumpulan data. Peneliti dapat memutuskan dan memperdalam atau memperluas proses pengumpulan data disesuaikan dengan temuan lapangan. (Royse, David et al, 2006, dan Creswell, John.W, 1994).

Prosedur evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menentukan fokus evaluasi, mempelajari kebijakan pelaksanaan Program Beasiswa UT Bagi Guru di Daerah 3T Tahun 2013, menjajagi aksesibilitas data, mengembangkan desain evaluasi, pengumpulan data, menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan, menampilkan data, kesimpulan dan saran.

Sumber data penelitian adalah UT Pusat, UPBJJ, dan kelompok belajar mahasiswa Program 3T di Kelompok Belajar (Pokjar) Kaur di Kabupaten Bengkulu (UPBJJ Bengkulu), Pokjar Tahuna (UPBJJ Manado), dan Kelompok Belajar Segiri dan Parang Tengah, Kabupaten Wonogiri (UPBJJ Surakarta). Penelitian dilaksanakan antara bulan April – November 2015.

Data yang terkumpul di uji dan disaring disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data kemudian dikategorisasi dengan *Model The Hierarchy of Policy Process*. Analisis dilakukan dengan membandingkan data dan informasi temuan dengan Pedoman dan konteks kebijakan. Satu persatu data dan informasi subfokus penelitian akan dikategorisasi dan dianalisis.

### **4. Temuan dan Pembahasan**

Temuan yang dilaporkan adalah data dan informasi yang diperoleh dari daftar isian yang dibagikan kepada mahasiswa dan hasil wawancara dengan mahasiswa dan Pejabat UPBJJ serta data observasi dan data yang bersumber dari data sekunder.

Penelitian dilakukan di tiga UPBJJ yaitu UPBJJ Manado, UPBJJ Surakarta dan UPBJJ Bengkulu. Secara geografis wilayah penelitian memiliki karakter geografis yang berbeda. Sebagai daerah terjauh, Kelompok Belajar Kaur di Kabupaten Bengkulu terletak di tepi pantai namun kebanyakan mereka adalah bertani. Waktu tempuh antara Pokjar dengan Kabupaten Bengkulu adalah 5 jam perjalanan. Sebagian dari mahasiswa adalah transmigran dari Jawa. Sedangkan Kabupaten Tahuna merupakan daerah terluar karena hanya 4 -6 jam perjalanan dengan menggunakan kapal ke Davao, Philipina, namun memerlukan waktu 11 jam dengan kapal ke Manado. Tahuna merupakan daerah kepulauan dengan mata pencaharian penduduknya adalah berkebun dan nelayan. Wilayah lain yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Wonogiri yang bergunung gunung. Lokasi kelompok belajar tersebar antara 70-100 km dari UPBJJ. Mayoritas penduduk di lokasi adalah sebagai petani.

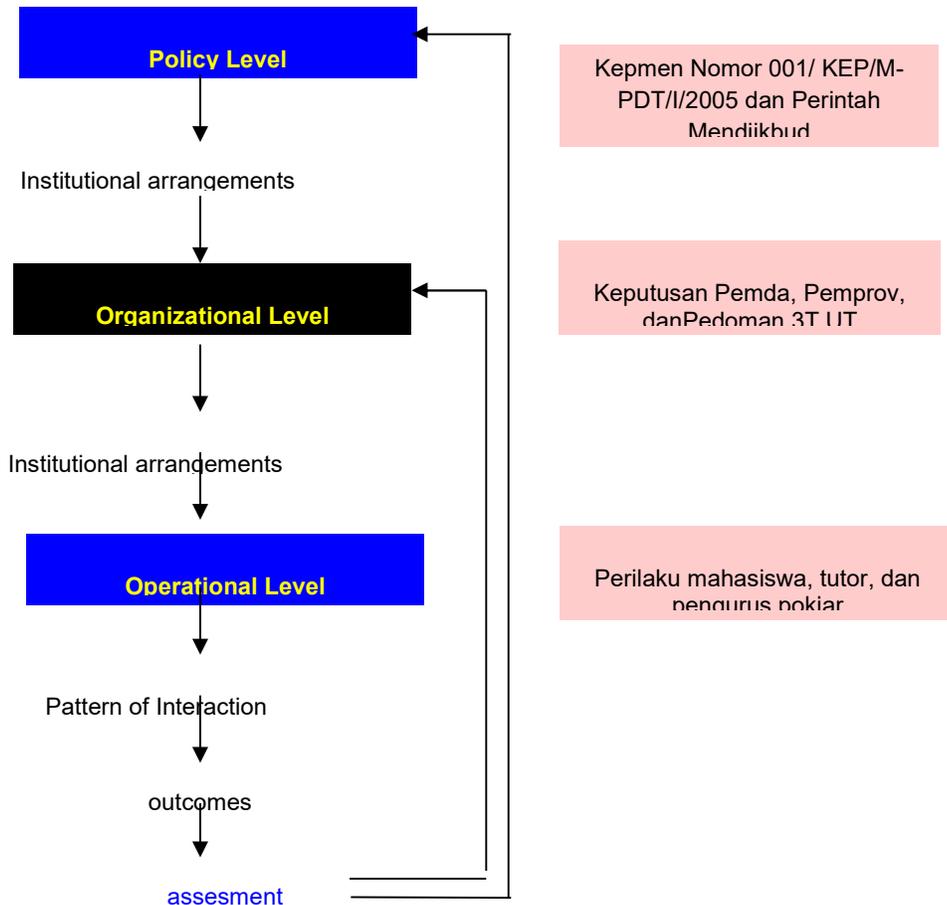
Penelitian di UPBJJ Manado dilakukan di Kelompok Belajar (Pokjar) Tahuna, di Bengkulu kelompok belajar Kaur, dan di UPBJJ Solo dilakukan di Kelompok Belajar Selogiri dan Karang Tengah. UPBJJ Manado melaksanakan Program beasiswa 3T di Pokjar Kabaruan, Lirung, Melonguane, Ratahan, dan Tahuna. Sedangkan di UPBJJ Surakarta dilaksanakan di Pokjar Selogiri, Parang Tengah, dan Parang Gupito. UPBJJ Bengkulu melaksanakan di satu pokjar yaitu di Pokjar Kaur dengan 114 mahasiswa (3 kelas). Semua kelompok belajar dikelola oleh pengurus pokjar non mahasiswa, kecuali di Pokjar Selogiri dan Karang Tengah. Di Pokjar Selogiri dan Karang Tengah UPBJJ Surakarta, kelompok belajar dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa.

Jumlah mahasiswa di Pokjar Pokjar Selogiri dan Parang Tengah sekitar 20 mahasiswa per kelas. Dari sisi usia, usia peserta antara 20 sampai 40 tahun. Mayoritas dari mereka adalah guru-guru honorer. Jarak tempat tinggal ke lokasi tutorial bervariasi ada yang kurang dari 10 km namun ada juga yang 60 km. Untuk mencapai lokasi tutorial untuk Kabupaten Wonogiri dan Bengkulu mahasiswa menggunakan alat transportasi angkutan kota dan motor. Sedangkan untuk mahasiswa di Tahuna yang wilayahnya kepulauan, mahasiswa menggunakan perahu, angkot, dan/atau motor.

Tingkat transportasi yang sulit, diduga merupakan salah satu penyebab tingginya mahasiswa berhenti dari program. Seperti yang ditunjukkan oleh mahasiswa di UPBJJ Manado. Tingkat mahasiswa keluar dari program yang cukup tinggi terjadi di UPBJJ Manado.

Kebijakan yang menjadi dasar pengembangan program Program Beasiswa UT Bagi Guru Di Daerah 3T adalah Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 001/ KEP/M-PDT/I/2005, Perintah Mendikbud kepada UT untuk memberikan beasiswa mahasiswa di wilayah 3T dan Keputusan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kab yang relevan. Berdasarkan kebijakan tersebut, UT mengeluarkan Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa (Pembebasan Biaya Studi) UT Bagi Guru Di Daerah 3T Tahun 2013. Atas dasar pedoman yang dikeluarkan oleh UT tersebut Program Beasiswa (Pembebasan Biaya Studi) UT Bagi Guru Di Daerah 3T dilaksanakan. Sedangkan lokasi penyelenggaraan Program Beasiswa (Pembebasan

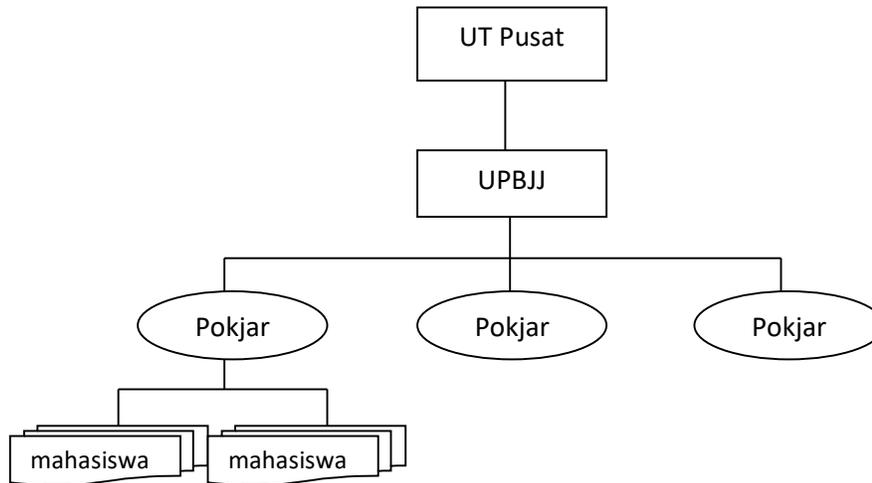
Biaya Studi) UT Bagi Guru Di Daerah 3T dipilih berdasarkan ketentuan dalam Kepmen PDT dan keputusan pemerintah daerah. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dituliskan dalam Bagan *Model The Hierarchy of Policy Process* maka bagannya menjadi seperti berikut.



Bagan *Model The Hierarchy of Policy Process*  
Kebijakan Penyelenggaraan Program Beasiswa 3T

Seperti tampak dalam Bagan di atas, kebijakan atau policy Program beasiswa 3T adalah Keputusan Menteri Daerah Tertinggal Nomor 001/ KEP/M-PDT/I/2005. Tindakan lanjut Kepmen tersebut dilakukan oleh gubernur dan bupati dalam bentuk implementasi program di daerah 3T di wilayah masing-masing. Salah satu bentuk keputusan pemerintah daerah adalah menetapkan daerah-daerah yang masuk dalam kategori 3T. Dalam menetapkan lokasi peserta program 3T masing-masing UPBJJ mengacu pada kebijakan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). UT menggunakan Kepmen dan kebijakan pemerintah daerah tersebut sebagai dasar pengembangan organisasi pelaksanaan program beasiswa 3T.

Organisasi pelaksanaan program disusun dalam bentuk struktur dan prosedur program yang dituangkan dalam bentuk Pedoman yang ditetapkan dengan SK Rektor. Dengan pedoman tersebut diharapkan perilaku pengelola dan mahasiswa dapat dikoordinasikan dan dikendalikan. Dalam pedoman disebutkan bahwa UT Pusat menerbitkan Pedoman pelaksanaan sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh UPBJJ. Di lapangan pelaksanaan program dikoordinasikan oleh kelompok belajar. Jika digambarkan dalam bentuk bagan maka struktur penyelenggaraan Program 3T oleh UT adalah sebagai berikut.



Bagan Struktur Penyelenggaraan Program Beasiswa 3T oleh UT

Jika memperhatikan Bagan Struktur Penyelenggaraan Program Beasiswa 3T oleh UT tersebut di muka nampak bahwa UPBJJ berperan sebagai operator pedoman yang dikeluarkan oleh UT Pusat, artinya UPBJJ harus menterjemahkan kebijakan Rektor yang berupa pedoman penyelenggaraan program beasiswa 3T menjadi tindakan. Efektif tidaknya proses penyelenggaraan program berada di UPBJJ. UPBJJ melaksanakan sebagian besar kegiatan mulai dari perencanaan kegiatan, penentuan lokasi kegiatan, sosialisasi program, merekrut mahasiswa dan tutor, dan bekerjasama dengan pokjar UPBJJ melaksanakan program, serta melaksanakan pengujian. Dari pengamatan, wawancara, dan isian mahasiswa peneliti mengkonstruksi *pattern of interaction* antara UPBJJ, Pokjar, dan mahasiswa dalam perencanaan kegiatan, penentuan lokasi kegiatan, sosialisasi program, merekrut mahasiswa dan tutor, dan bekerjasama dengan pokjar UPBJJ melaksanakan program, serta melaksanakan pengujian.

Dari bagan diatas nampak bahwa pokjar memiliki peranan penting terhadap proses belajar mengajar. Pokjar merupakan jembatan antara mahasiswa dan UPBJJ. Di Pokjar Kaur dan Pokjar Tahuna, organisasi Pokjar dikelola oleh pegawai dinas atau orang lain yang bukan mahasiswa. Pokjar mengurus urusan mulai dari informasi, registrasi, pengelolaan proses pembelajaran, membantu penyelenggaraan ujian, sampai

penyelesaian masalah administrasi akademik mahasiswa. Sedangkan Pokjar Selogiri dan Pokjar Parang Tengah seluruh manajemen Pokjar dikendalikan oleh mahasiswa. UPBJJ Surakarta memsupervisi dan memberikan layanan kepada pokjar tersebut. Untuk Pokjar Kaur dan Pokjar Tahuna tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan manajemen Pokjar. UPBJJ Bengkulu dan Manado tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa melainkan melalui pokjar masing masing.

Berdasarkan Bagan (Bromley, 1989) di atas, evaluasi akan dilakukan pada tingkat organisasi dan tingkatan operasionalnya dengan mengevaluasi *pattern of interaction*nya. Keefektifan organisasi pelaksanaan program akan dinilai dari keefektifan tingkat operasionalnya.

*Pattern of interaction* yang diamati adalah interaksi antar mahasiswa; interaksi antara mahasiswa dengan bahan ajar, tutor, pengurus pokjar dan UPBJJ, serta perilaku belajar mandiri mahasiswa. Sedangkan outcome yang diamati adalah IPK mahasiswa. Pengamatan dilakukan pada saat peneliti datang ke lapangan dan sebagian berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, pokjar dan UPBJJ.

Dari data yang diperoleh kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan pedoman adalah sebagai berikut. Sosialisasi dilakukan kepada para calon peserta program yaitu guru-guru yang mengajar di lokasi sasaran. Sosialisasi dilakukan oleh UPBJJ bekerjasama dengan dinas pendidikan dan pokjar. Setelah sosialisasi maka UPBJJ membuka pendaftaran. Calon yang mendaftar diwawancara oleh pokjar dengan disupervisi oleh UPBJJ. Calon mahasiswa yang diterima untuk mengikuti program diminta melengkapi berkas. Pengumuman kelulusan seleksi dilakukan melalui sekolah masing masing. Mahasiswa dapat mengakses pengumuman yang dilakukan melalui sekolah masing masing. Kemudian mahasiswa diberikan pengumuman tentang registrasi yang harus dilakukannya. Sampai dengan tahapan ini seluruh ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman pelaksanaan program dapat dilaksanakan, artinya bentuk interaksi yang diharapkan dapat terlaksana. Tidak diperoleh informasi adanya keluhan sampai dengan tahapan ini.

Tahapan berikutnya adalah kegiatan orientasi study mahasiswa baru (OSMB). Dari tiga lokasi yang diamati, ternyata hanya mahasiswa yang berlokasi di Wonogiri UPBJJ Surakarta yang melaksanakan OSMB. Sedangkan untuk Pokjar Kaur dan Pokjar Tahuna tidak ada OSMB. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, kendala utama tidak dilakukannya OSMB adalah masalah jarak. Jarak antara Pokjar di Wonogiri dengan kantor UPBJJ Surakarta sekitar 2-3 jam perjalanan darat. Sedangkan Pokjar Kaur minimal 5 jam perjalanan. Sedangkan Pokjar Tahuna memerlukan waktu lebih dari 11 jam untuk sampai ke UPBJJ Manado. Ketentuan yang mengharuskan OSMB dilakukan di UPBJJ menyebabkan OSMB tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses belajar, menurut data dan informasi yang diperoleh tidak ada masalah. Bahan ajar diterima sebelum tutorial dilaksanakan. Tutorial tatap muka dilakukan 8 kali satu semester. Untuk tutorial, di dua lokasi penelitian yaitu Pokjar Kaur dan Pokjar

Tahuna mahasiswa tampak kelelahan begitu sampai di tempat tutorial. Sebagian mahasiswa berasal dari lokasi yang jauh dengan perjalanan yang berat. Untuk Pokjar Selogiri dan Pokjar Parang Tengah di Wonogiri tidak nampak adanya faktor kelelahan. Mahasiswa di Wonogiri tampak antusias mengikuti tutorial.

Dari hasil wawancara dan observasi diperoleh informasi di Pokjar Kaur bahwa sarana belajar utama mereka adalah bahan ajar cetak yang dikombinasikan dengan tutorial tatap muka dan belajar mandiri. Untuk Pokjar Tahuna sarana belajar utama mereka adalah bahan ajar cetak yang dikombinasikan dengan tutorial tatap muka, belajar mandiri, dan sebagian kecil mahasiswa membuka website UT dan sumber lain. Namun karena akses internet sulit di Tahuna, maka hanya sebagian kecil mahasiswa yang menggunakan internet sebagai sarana belajar mandiri. Sedangkan untuk Pokjar Selogiri dan Pokjar Parang Tengah mahasiswa sudah mengkombinasikan bahan ajar cetak dengan tutorial tatap muka, website UT, *open educational resources* yang banyak mereka akses melalui *search engine Google*, dan diskusi dengan sesama mahasiswa baik secara tatap muka maupun dengan menggunakan media online. Dengan demikian, mahasiswa Pokjar Selogiri dan Pokjar Parang Tengah yang paling banyak menggunakan metode blended (kombinasi) learning dalam belajar mandiri. Walaupun mahasiswa di pokjar Selogiri dan Parang Tengah harus turun gunung lebih kurang 10 km untuk memperoleh akses internet. Dari data dan informasi mahasiswa rata rata IPK untuk Pokjar Kaur dan Tahuna adalah 2.50 sedangkan untuk Pokjar Selogiri dan Pokjar Parang Tengah 3.00.

Berdasarkan data dan pembahasan ditemukan bahwa Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 001/ KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dapat menjadi sumber kebijakan dalam pelaksanaan program beasiswa bagi guru di daerah 3T. Sedangkan Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa (Pembebasan Biaya Studi) UT Bagi Guru Di Daerah 3T Tahun 2013 yang diterbitkan UT yang merupakan pedoman penyelenggaraan Program Beasiswa (Pembebasan Biaya Studi) UT Bagi Guru Di Daerah 3T sebagian besar dapat dilaksanakan.

Menurut kerangka pikir *The Hierarchy of Policy Process* dari Bromley, *pattern of interaction* yang dibentuk melalui *organizational arrangement* dapat bekerja di pokjar seperti yang diharapkan. Ketentuan yang tidak dapat berjalan adalah ketentuan pelaksanaan OSMB di kantor UPBJJ. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan institusi (UPBJJ) dan mahasiswa dalam pengelolaan pokjar. Berdasarkan pengamatan, ketelibatan mahasiswa dan UPBJJ dalam pengelolaan pokjar akan meningkatkan motivasi mahasiswa dalam perilaku sosial mereka yang diduga juga berdampak pada meningkatkannya motivasi belajar mahasiswa. Pengelolaan pokjar oleh mahasiswa telah meningkatkan ikatan social mereka sehingga mereka lebih akrab dan saling mendukung dalam proses belajar. Berdasarkan pengamatan Pokjar Selogiri dan Pokjar Parang Tengah memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pokjar Kaur dan Pokjar Tahuna. Output proses pembelajaran antara lain dicerminkan oleh IPK. Dari rata rata IPK yang diperoleh, rata rata IPK Pokjar Pokjar Selogiri dan

Pokjar Parang Tengah lebih tinggi (rata-rata 3.00) dibandingkan dengan rata-rata IPK dua Pokjar lainnya (2.50).

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Pedoman program beasiswa UT bagi guru di daerah 3T pada tahun 2013 sudah efektif untuk mengelola program beasiswa bagi guru di daerah 3 T, namun perlu disempurnakan terutama pada bagian rekrutmen, proses belajar, dan peranan pokjar dan UPBJJ perlu ditingkatkan. Dari perilaku yang teramati terdapat perbedaan motivasi peserta (mungkin kelelahan fisik) dalam mengikuti tutorial. Antusiasme dan keakraban dalam kelompok belajar mahasiswa di Wonogiri terlihat lebih tinggi. Jumlah mahasiswa yang tidak meneruskan program di Manado cukup tinggi. Untuk Bengkulu, peneliti tidak memiliki datanya. Keempat pokjar yang diteliti memiliki kesulitan dalam transportasi dan jaringan komunikasi.

Perbedaan output dari ketiga wilayah berdasarkan pengamatan diduga disebabkan oleh adalah faktor motivasional yang berbeda; faktor transportasi dan komunikasi menjadi hambatan utama proses dalam belajar, namun di wonogiri hambatan tersebut teratasi dengan motivasi belajar yang tinggi dan keakraban kelompok; dan peran institusi memberikan pengaruh pada peningkatan motivasi belajar mahasiswa.

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan bahwa tidak ada peranan program studi (PS) dalam pengelolaan Program. PS perlu dilibatkan. Pedoman perlu disempurnakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan peranan institusi.

## **6. Daftar Pustaka**

- Bromley, Daniel W., *Economic Interests and Institutions*, Cambridge, Basil Blackwell. 1989.
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California, Sage Publication 1994
- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 001/ KEP/M-PDT//2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Madaus, George, Michael S Scriven, dan Daniel L. Stufflebeam., *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Service Evaluation*. Boston, Kluwer-Nijhoff Publishing, 1983. H.118.
- Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa (Pembebasan Biaya Studi) UT Bagi Guru Di Daerah 3t Tahun 2013
- Royse, David et al, *Program evaluation : An Introduction*, Belmont, Wadsworth Cengage Learning, 2006.
- Stupak, Nataliya, *Towards Improvement Of Performance Of Environmental Policies: Addressing Policy Implementation*, hal. 2, [http://www.esee2011.org/registration/fullpapers/esee2011\\_6e5025\\_1\\_1305697321\\_4924\\_2163.pdf](http://www.esee2011.org/registration/fullpapers/esee2011_6e5025_1_1305697321_4924_2163.pdf)